



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Kamis

Tanggal: 22 Juli 2021

Halaman: 9

MASYARAKAT AGAR PANDAI SARING BERITA Bulog DIY Salurkan Bantuan Beras PPKM Darurat

YOGYA (KR) - Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) bekerja sama dengan Pemkab/Pemkot se-DIY melalui Dinas Sosial (Dinsos) menyalurkan tambahan Bantuan Beras Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (BB-PPKM) 2021 mulai Minggu (18/7).

Pihaknya siap menyalurkan sebanyak 3.318.370 Kg beras bagi total 331.837 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BB-PPKM di DIY yang ditargetkan secepatnya selesai sebagai konsekuensi dari pelaksanaan PPKM Darurat yang diperpanjang sampai 25 Juli 2021.

Kepala Perum Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) DIY Juaheni menyampaikan penyaluran BB-PPKM 2021 ini dilakukan serentak di seluruh daerah di tanah air. Hal ini sesuai instruksi Presiden Joko Wi-

dodo agar segera menyalurkan BB-PPKM kepada 10 juta KPM Bantuan Sosial Tunai (BST) dan 10 juta KPM Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai data dari Kementerian Sosial (Kemensos).

"Setiap KPM akan mendapat tambahan bantuan beras sebanyak 10 Kg dari program BB-PPKM tersebut. Stok beras kami pun banyak termasuk yang digunakan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk PPKM Darurat di DIY ini. Kami melibatkan PT Pos

Indonesia sebagai transporter untuk penyaluran bansos BB-PPKM di DIY," tuturnya kepada KR di Yogyakarta, Rabu (21/7).

Juaheni menyampaikan rencana penyaluran BB-PPKM 2021 di DIY total sebanyak 3.318.370 Kg bagi total 331.849 KPM dengan rincian 196.988 PKH dan 134.849 BST di DIY. Rincian BB-PPKM di DIY, sebanyak 841.180 Kg bagi 84.118 KPM di Sleman, 204.590 Kg bagi 20.459 KPM di Kota Yogyakarta, 953.710 Kg bagi 95.371 KPM di Gunungkidul, 529.810 Kg bagi 52.981 KPM di Kulonprogo dan 790.080 Kg bagi 78.908 KPM di Bantul.

"Jika ditotal dengan realisasi penyaluran BB-PPKM 2021 DIY dengan area kami di cabang Kedu dan Banyumas maka mencapai

12.965.290 Kg bagi 1.296.529 KPM per 19 Juli 2021 lalu," tandasnya.

Sementara itu terkait masih banyaknya berita hoaks, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI) dr Hermawan Saputra meminta masyarakat untuk betul-betul menyaring berita serta opini yang berkembang baik di media publik, maupun di media sosial. Dicontohkan, jika ada tokoh agama yang memberikan pernyataan tertentu, apakah tokoh agama ini betul-betul mewakili institusinya atau juga memiliki otoritas terkait dengan apa yang disampaikan.

"Hal itu harus diverifikasi supaya sejalan juga dengan tokoh agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)," ucap dr Hermawan, akhir pekan lalu. (Ira/Ret)-f

Instansi

1.
2.
3.
4.
5.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005